

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Dasar Pemikiran

Sejarah mengenai orang-orang Tionghoa di Indonesia mulai menjadi topik yang umum untuk dibahas dalam historiografi Indonesia semenjak kejatuhan kekuasaan Presiden Soeharto pada tahun 1998. Selama masa pemerintahan Orde Baru, tema mengenai orang Tionghoa kurang menjadi perhatian oleh berbagai pihak, terutama mereka yang terafiliasi dengan pemerintah karena adanya berbagai peraturan dan kebijakan yang bernada diskriminasi bagi etnis Tionghoa. Akibatnya, banyak tokoh-tokoh dan peristiwa memiliki kaitan dengan etnis Tionghoa tidak terlalu difokuskan dalam penulisan sejarah yang secara ironis dituliskan dengan pandangan Indonesia-sentris.

Setelah kejatuhan Presiden Soeharto, para sejarawan mulai melakukan penulisan sejarah untuk membuka tabir yang sudah tertutupi selama 32 tahun mengenai sejarah orang etnis Tionghoa yang selama ini sudah berada di wilayah Indonesia semenjak masa kerajaan Hindu-Buddha masih berlangsung. Salah satu topik dari historiografi Indonesia yang mulai diungkap adalah keberadaan dan kontribusi orang-orang Tionghoa di wilayah Batavia, yang pada masa kini dikenal sebagai Jakarta. Sebuah provinsi serta menjadi ibu kota dari negara Kesatuan Republik Indonesia dengan nama resmi Daerah Khusus Ibu kota Jakarta.

Jakarta atau bernama Batavia pada periode awal abad ke-17 hingga akhir abad ke-18, dikuasai oleh *Vereenigde Oostindische Compagnie* (VOC) atau dikenal juga sebagai Perusahaan Hindia Timur Belanda yang berdiri pada tanggal 20 Maret 1602, dengan tujuan untuk menguasai perdagangan rempah-rempah di kawasan Asia Tenggara (Boxer, 1983). Perusahaan ini memiliki hak khusus yang diberikan oleh *Staten Generaal* (Dewan Negara Belanda) dalam melakukan aktivitas perdagangan (Boxer,

1983). Sebagai perusahaan, VOC sendiri dipimpin oleh 17 orang direktur yang bernama *Heeren XVII*. Lalu di bawah *Heeren XVII*, terdapat *Hoge Regering* (Pemerintah Kolonial) dengan jabatan *Gouverneur-Generaal* (Gubernur Jenderal) dan *Raad van Indië* (Dewan Hindia) (Boxer, 1983).

Kekuasaan VOC atas Batavia merupakan tujuan puncak mereka pada masa itu untuk mendapatkan wilayah sebagai tempat markas besar dan “*rendezvous*“. Keberhasilan ini tidak lepas dari keberuntungan dan niat yang besar dari Gubernur Jenderal VOC dan juga penakluk kota, bernama Jans Pieterszoon Coen yang sudah pernah memiliki ide bahwa tujuan perdagangan VOC akan tercapai dengan sukses jika diiringi dengan tindakan kekerasan. Setelah merebut kota, sebagai Gubernur Jenderal Coen mulai merancang sebuah koloni dengan penduduk yang multikultural, dengan sistem administrasi stratifikasi sosial ala Eropa yang khas akan segregasi dan diskriminasi demi menjaga koloni tetap memberikan keuntungan kepada VOC.

Sistem stratifikasi sosial ini membedakan penduduk kota berdasarkan etnis untuk membuat mereka bekerja sesuai dengan “peran” yang sudah diatur. Salah satu penduduk Batavia yang memiliki “peran” yang besar dalam bidang perekonomian adalah orang etnis Tionghoa. Mereka sebagai imigran yang bisa dibilang diperlakukan secara spesial oleh Pemerintah Kolonial. Hal ini tidak perlu diperdebatkan karena atas keberadaan orang-orang Tionghoa, Kota Batavia mulai mengalami perkembangan ekonomi yang signifikan seiring waktu. Tidak diragukan jika muncul relasi yang mendalam antara Pemerintah Kolonial sebagai penguasa kota dengan orang Tionghoa sebagai penduduk yang memiliki kedudukan dalam stratifikasi sosial dan kelebihan dalam bidang perekonomian.

Keberadaan relasi ini sudah direkonstruksi oleh sejarawan Leonard Blussé (2004) dalam bukunya yang berjudul “*Persekutuan Aneh: Pemukim Cina, Wanita Peranakan dan Belanda di Batavia VOC*”. Ia sendiri sudah

melakukan penelitian historis tentang sejarah Kota Batavia dan penjelasan terkait bagaimana hubungan antara VOC dengan orang-orang Tionghoa berdasarkan berbagai kegiatan ekonomi dan sosial yang dilakukan oleh di kota tersebut selama periode tahun 1619 sampai 1740. Tentu ini memberikan alasan bagi Blussé untuk memberi nama hubungan kedua pihak ini sebagai “*strange company*” atau dalam bahasa Indonesia menjadi “persekutuan aneh”.

Selain Leonard Blussé, sejumlah sejarawan juga telah berupaya merekonstruksi dalam konteks sejarah Batavia beserta dengan kehidupan sosial dan ekonomi orang Tionghoa di kota tersebut. Terdapat sejumlah nama yang pernah menuliskan historiografi terkait tema Batavia seperti, F. de Haan, Johannes Theodorus Vermeulen, B. Hoetink, Claude Salmon, Leonard Blussé, Onghokam, Mona Lohanda, dan lain-lain. Masing-masing peneliti sejarah ini telah memberikan kontribusi yang signifikan dalam menjelaskan mengenai sejarah Batavia dan orang-orang Tionghoa, meskipun dengan fokus penelitian yang berbeda-beda. Akan tetapi, penelitian yang sangat berkaitan dengan penulis masih menjadi penelitian dari Leonard Blussé.

Mengenai orang Tionghoa sendiri, jika membaca salah satunya penulisan sejarah Batavia dilakukan oleh F. de Haan (1922) mantan kepala *landsarchief* yang terbit dalam buku berjudul “*Oud Batavia*”. Secara lugas, de Haan menjelaskan dan memberikan gambaran tentang sejarah Batavia ditambah dengan argumen bahwa periode kemakmuran Batavia berlangsung dari tahun 1685 hingga 1730. Meskipun buku karya de Haan tersebut menjadi salah satu rujukan penting dalam memahami sejarah kota ini ketika dikuasai oleh VOC, pandangannya masih terbatas pada sumber arsip VOC dan tidak memiliki penjelasan terkait apa yang mempengaruhi kemakmuran Kota Batavia yang disebutkan oleh de Haan itu sendiri.

Sejarawan seperti Leonard Blussé sendiri memberikan pendapat untuk menjawab kekosongan dalam argumen periode kemakmuran Batavia



menurut F. de Haan. Blussé sendiri memberikan argumen tambahan bahwa salah satu faktor keberhasilan Batavia mencapai masa keemasan tidak dapat dilepaskan dari keberadaan dan relasi orang-orang Tionghoa dengan penguasa Batavia. Salah satu fokus Blussé dalam menjelaskan relasi Tionghoa-VOC ini menyoroti atas kehadiran Kapiten Tionghoa, sebuah hasil dari kebijakan kepemimpinan etnis yang didasari oleh keistimewaan Tionghoa dalam stratifikasi sosial.

Kebijakan Kapiten Tionghoa sendiri merupakan salah satu hasil dari kebijakan-kebijakan yang pernah dikeluarkan oleh Pemerintah Kolonial, kebijakan ini pada dasarnya dibuat secara bersama oleh Gubernur Jenderal dengan Dewan Hindia dengan tujuan untuk mengatur kehidupan sosial dan ekonomi penduduk di Kota Batavia. Bagi orang Tionghoa sendiri, adanya berbagai kebijakan yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial menunjang orang-orang yang pada akhirnya memberikan banyak keuntungan bagi Kota Batavia dan VOC. Mona Lohanda (2007) dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia” sudah memberikan penjelasan mengenai kebijakan apa saja yang diterapkan kepada penduduk kota termasuk orang-orang Tionghoa oleh Pemerintah Kolonial.

Menurut Leonard Blussé, hubungan kerja sama antara komunitas Tionghoa dan VOC dapat dipahami melalui peran dan kekuasaan Kapitan Tionghoa, yang sangat bergantung pada kebijakan Gubernur Jenderal. Namun, hubungan ini tidak selalu berjalan harmonis. Blussé berpendapat bahwa keretakan dalam kerja sama tersebut disebabkan oleh melemahnya otoritas Kapitan Tionghoa di mata komunitasnya sendiri. Di sisi lain, atas penelitian Mona Lohanda, penulis dapat melihat pandangan yang berbeda, dengan menyebutkan bahwa kerusakan hubungan antara orang Tionghoa dan VOC tidak semata-mata disebabkan oleh kemerosotan kekuasaan Kapitan Tionghoa, melainkan juga oleh berbagai faktor lain yang turut memengaruhinya.

Jika dilihat lebih lanjut dalam buku “Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia”, peneliti sendiri menemukan adanya salah satu kebijakan yang merusak kerja sama atau hubungan antara Tionghoa dengan VOC di Batavia, kebijakan ini bernama *permissiebriefjes*. Kebijakan ini memaksa kepada seluruh orang Tionghoa untuk memiliki surat izin tinggal. Alasan penerapan kebijakan ini adalah untuk mengatasi masalah kriminalitas di Batavia yang dituduhkan oleh Pemerintah Kolonial dilakukan oleh orang-orang Tionghoa pengangguran yang secara massal berdatangan ke Batavia. Maka, Pemerintah Kolonial berusaha untuk membuat dan menerapkan kebijakan pembatasan imigran dan kependudukan untuk mengurangi jumlah imigran dan populasi orang Tionghoa di Batavia.

Pemerintah Kolonial hanya menerapkan kebijakan *permissiebriefjes* kepada orang-orang Tionghoa di Batavia untuk dapat tinggal dan bekerja secara legal dengan pekerjaan atau kemampuan untuk menggerakkan ekonomi kota sesuai dengan peran mereka dalam stratifikasi sosial. Namun, pada kenyataannya setelah penerapan kebijakan *permissiebriefjes*, hubungan antara VOC yang diwakili oleh Pemerintah Kolonial dengan orang-orang Tionghoa di Batavia menjadi rusak, yang bahkan semakin memburuk seiring berjalan waktu, dan pada akhirnya terjadi pemberontakan yang dilakukan oleh orang-orang Tionghoa di luar kota yang menghasilkan tragedi pembunuhan massal Tionghoa di dalam Kota Batavia pada tahun 1740.

Berdasarkan pemikiran tersebut, penulis berargumen bahwa salah satu penyebab keretakan hubungan "mesra" antara orang-orang Tionghoa dan VOC yang telah terjalin sejak tahun 1619, merupakan akibat dari penerapan kebijakan *permissiebriefjes* oleh Pemerintah Kolonial semasa Gubernur Jenderal Mattheus de Haan pada tahun 1727. Memberikan pandangan pribadi bahwa karena kebijakan ini, telah terjadi titik balik

dalam dinamika sosial-ekonomi yang sudah berjalan seiring waktu oleh kedua pihak ini.

Selain itu, penulis menemukan adanya perbedaan interpretasi tersendiri terhadap kebijakan *permissiebriefjes* oleh sejarawan. Secara terminologi, istilah "*permissiebriefjes*" dalam bahasa Belanda jika diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia mengacu pada "surat izin tinggal". Namun, ketika diterjemahkan secara literal, istilah ini hanya mengandung arti "surat izin" tanpa adanya kata "tinggal" yang secara eksplisit hanya mengacu pada surat izin.

Sedangkan ketika melakukan terjemahan langsung dari "surat izin tinggal" dalam bahasa Indonesia ke bahasa Belanda seharusnya menjadi "*permissie verblijf brief.*" Menunjukkan bahwa adanya perbedaan dalam makna yang dapat ditangkap ketika hanya melihat terjemahan literal dibandingkan dengan terjemahan kontekstual. Perbedaan ini tertera secara jelas pada arsip *plakaatboeken*, di mana hanya kata "*permissiebriefjes*" dan ketika diterjemahkan secara harfiah, hasilnya adalah "surat izin". Jika ingin memahami konteks spesifik dari izin yang dimaksud, setiap peneliti sejarah harus memahami terlebih dahulu isi dan tujuan dari penerbitan setiap plakat yang berlaku pada saat itu, di mana sudah pasti hal ini tertulis dalam plakat-plakat tersebut.

Perbedaan dalam interpretasi istilah "*permissiebriefjes*" inilah yang di amati oleh penulis dari penelitian Lilie Suratminto, (2004) di artikelnya yang berjudul "Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740: Dampak Konflik Golongan *Prinsgezinden* dan *Staatsgezinden* di Belanda" mengemukakan pandangannya bahwa *permissiebriefjes* berfungsi sebagai kartu tanda masuk bagi orang Tionghoa. Pendapat ini menunjukkan bagaimana dokumen tersebut dapat dipahami sebagai sarana untuk mengatur akses masuk orang Tionghoa ke Batavia, menciptakan batasan sosial dan politik yang mengakar dalam masyarakat pada waktu itu.



Di sisi lain, Mona Lohanda (2007) dalam bukunya yang berjudul “Sejarah Para Pembesar Mengatur Batavia” memberikan interpretasi yang berbeda, menyebutkan bahwa *permissiebriefjes* merupakan surat izin tinggal bagi orang Tionghoa di Batavia. Mona Lohanda lebih menyoroti aspek legalitas dan formalitas yang melekat pada dokumen tersebut, di mana *permissiebriefjes* tidak hanya berfungsi sebagai alat kontrol sosial tetapi juga sebagai pengakuan resmi bagi orang-orang Tionghoa di Batavia. Perbedaan interpretasi ini adalah hal yang wajar terjadi, mengingat bahwa sejarah bisa saja ditafsirkan dari berbagai sudut pandang yang berbeda.

Berdasarkan argumen dan perbedaan interpretasi yang muncul, penulis tertarik untuk mengkaji kebijakan *permissiebriefjes* (surat izin tinggal) secara mendalam sebagai objek penelitian historis ini. Penelitian ini juga bertujuan untuk menghadirkan unsur kebaruan (*novelty*), khususnya terkait dengan konsep “persekutuan aneh” menurut Blussé. Penulis berpendapat bahwa kerusakan hubungan antara komunitas Tionghoa dan VOC dapat dijelaskan melalui kebijakan pembatasan yang penah diterapkan yang menjadi penanda awal keretakan relasi tersebut. Hal ini secara signifikan memengaruhi dinamika sosial-ekonomi serta menciptakan ketegangan yang berakhiran dengan tragis di kota Batavia.

Penelitian ini juga bertujuan mengisi celah dalam narasi akademis terkait momen-momen krusial yang mengubah hubungan antara orang-orang Tionghoa dan pemerintah kolonial VOC. Meskipun peran orang Tionghoa dalam sejarah Batavia diakui, aspek-aspek tertentu yang menentukan perubahan hubungan tersebut belum banyak dibahas secara mendalam. Oleh karena itu, penelitian ini berfokus pada kebijakan *permissiebriefjes* sebagai salah satu elemen penting dalam rekonstruksi sejarah Batavia. Melalui kajian ini, diharapkan dapat diperoleh pemahaman yang lebih komprehensif tentang peran komunitas Tionghoa dalam sejarah Batavia, sekaligus dinamika sosial-ekonomi yang berkembang pada masa itu.

Dalam konteks ini, perlu diketahui bahwa sebagian besar masyarakat di Jakarta ataupun Indonesia masih kurang menyadari keberadaan surat-surat ini. Padahal surat ini menjadi bukti bahwa VOC juga melakukan tindakan sewenang-wenang terhadap orang etnis Tionghoa di kota Batavia. Meskipun awalnya VOC memiliki hubungan yang baik dengan orang Tionghoa, tetapi dikarenakan terjadinya perubahan sosial-ekonomi, maka VOC menjadi berlaku secara sewenang-wenang terhadap orang-orang Tionghoa.

Terdapat beberapa penelitian mengenai tema yang hampir sama di antaranya karya Lilie Suratminto (2004) berjudul “Pembantaian Etnis Cina di Batavia 1740: Dampak Konflik Golongan *prinsgezinden* dan *staatsgezinden* di Belanda.” Penelitian ini mengungkap bagaimana konflik antara kedua golongan tersebut di Belanda berdampak signifikan terhadap konflik internal Pemerintah Kolonial di Batavia pada akhir tahun 1730 sampai 1740. Selain itu, Fokky Fuad (2013) juga mengulas peristiwa yang sama dalam penelitiannya yang berjudul “Peristiwa *Chinesetroubelen* di Batavia: Sebuah Tinjauan Sejarah Hukum.” Dalam karya ini, Fuad menyajikan analisis mendalam mengenai pembantaian massal tahun 1740 dari perspektif hukum yang berlaku pada masa itu.

Sementara itu, penelitian ini akan lebih fokus mengenai pengaruh dari penerapan kebijakan *permissiebriefjes* terhadap kerusakan relasi antara VOC dan orang-orang Tionghoa. Dengan demikian, penelitian ini bertujuan untuk memberikan wawasan baru mengenai faktor-faktor yang memengaruhi hubungan sosial dan ekonomi antara VOC dan masyarakat Tionghoa, serta bagaimana kebijakan *permissiebriefjes* yang diterapkan dapat berkontribusi pada ketegangan yang akhirnya berujung pada peristiwa tragis seperti pembantaian di tahun 1740.

## **B. Pembatasan dan Perumusan Masalah**

### **1. Pembatasan Masalah**



Pada masa pemerintahan VOC di Kota Batavia, Gubernur Jenderal bersama Dewan Hindia, yang dikenal dengan sebutan *Hoge Regering*, secara rutin mengeluarkan berbagai kebijakan yang ditujukan kepada seluruh penduduk Batavia, termasuk mereka yang berasal dari kalangan Eropa, Asia, dan lokal. Kebijakan-kebijakan ini memiliki pengaruh yang signifikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi masyarakat setempat. Secara khusus, etnis Tionghoa, yang memainkan peran penting dalam perekonomian Batavia dan VOC, menerima perlakuan kebijakan yang unik dan berbeda, mengingat kontribusi mereka terhadap perkembangan sosial-ekonomi kota.

Salah satu kebijakan yang sering terabaikan oleh para peneliti sejarah, namun penting untuk dipahami, adalah kebijakan *permissiebriefjes* atau dikenal juga sebagai surat izin tinggal. Kebijakan ini memiliki dua aspek utama yang menarik perhatian, yakni: *Pertama*, kebijakan ini dikeluarkan secara resmi oleh Pemerintah Kolonial sebagai solusi terakhir terhadap berbagai permasalahan yang dihadapi oleh komunitas Tionghoa di Batavia. *Kedua*, penerapan kebijakan tersebut pada akhirnya memicu reaksi keras dari kedua belah pihak, baik orang-orang Tionghoa dan pihak VOC yang berujung pada tragedi besar yang menandai sejarah kota tersebut.

Kota Batavia dipilih sebagai latar tempat karena kota ini merupakan pusat pemerintahan dan perdagangan VOC di mana memiliki populasi orang-orang Tionghoa pada abad ke-17 sampai akhir abad ke-18. Atas dasar ini, Batavia menjadi satu-satunya tempat penerapan kebijakan *Permissiebriefjes*. Akibat permasalahan sosial, ekonomi, dan internal Pemerintah Kolonial yang diderita oleh Kota Batavia, menyebabkan timbul permasalahan yang menyangkut orang Tionghoa di Batavia. Pemerintah Kolonial sendiri menyelesaikan masalah dengan secara brutal mengakibatkan adanya perubahan pandangan dan kebijakan secara sistematis antara orang-orang Tionghoa dengan VOC di kota Batavia.

Rentang waktu yang dipilih oleh peneliti adalah dari tahun 1727 hingga tahun 1742, selama 15 tahun. Alasan peneliti mengambil batas awal tahun 1727, karena berdasarkan tulisan dalam *plakaat* yang pertama kali menyatakan kalimat *permissiebriefjes* atau surat izin tinggal pada tanggal 10 Juni 1727, serta pelaksanaan aturan ini mulai pertama kali diterapkan dan dipergunakan untuk membatasi kedatangan orang Tionghoa di Batavia. Sedangkan tahun 1742 dipilih sebagai batas akhir penelitian atas dasar penerapan kebijakan *permissiebriefjes* masih dilanjutkan sampai tahun 1743, sesudah terjadinya tahun 1740.

## **2. Perumusan Masalah**

Terkait dengan batasan masalah di atas, maka rumusan masalah yang akan dibahas terdiri dari beberapa poin, diantaranya:

1. Bagaimana awal hubungan sosial-ekonomi antara VOC dan masyarakat Tionghoa di Batavia dari periode 1619—1690?
2. Bagaimana perubahan politik dan ekonomi mendorong VOC untuk menerapkan kebijakan *permissiebriefjes* terhadap Orang Tionghoa di Batavia selama periode 1690—1727?
3. Bagaimana kebijakan *permissiebriefjes* berperan sebagai titik balik dalam mengubah dinamika sosial-ekonomi antara VOC dan Orang Tionghoa di Batavia pada periode 1727—1742?

## **C. Tujuan dan Kegunaan**

### **1. Tujuan**

Tujuan dari penelitian adalah untuk merekonstruksi bagaimana kebijakan *permissiebriefjes* yang diterapkan oleh Pemerintah Kolonial di Batavia pada tahun 1727 menjadi titik balik dalam dinamika sosial-ekonomi antara orang etnis Tionghoa dengan Pemerintah Kolonial yang sudah terjalin secara harmonis semenjak Kota Batavia berdiri pada tahun 1619.

### **2. Kegunaan**

1. Secara teoretis, diharapkan penelitian ini dapat menjadi sumber informasi dan menambah wawasan mengenai hubungan antara perusahaan VOC yang diwakili oleh Pemerintah Kolonial dengan orang etnis Tionghoa yang menjadi penduduk di Kota Batavia, khususnya sebelum dan sesudah kebijakan *permissiebriefjes*.
2. Secara praktis, penelitian ini dapat digunakan untuk memperbaiki serta menjadi pelajaran bagi masyarakat yang membaca dan peduli akan sejarah serta menunjukkan bahwa masyarakat etnis Tionghoa di Kota Jakarta pernah merasakan ketertindasan dan melakukan perlawanan terhadap bangsa Eropa akibat dari kebijakan yang dikeluarkan secara sewenang-wenang.

#### **D. Metode dan Bahan Sumber**

##### **1. Metode Penelitian**

Metode yang digunakan oleh peneliti dalam penelitian ini adalah metode historis. Menurut Kuntowijoyo (2013) Penelitian historis memiliki lima tahapan penelitian, yakni pemilihan topik, pengumpulan sumber (heuristik), verifikasi, interpretasi, dan penulisan sejarah (historiografi).

Tahapan pertama adalah pemilihan topik, di mana peneliti menentukan fokus penelitian yang akan diteliti lebih mendalam. Tahapan ini krusial karena topik yang dipilih harus memiliki relevansi historis serta signifikansi akademik. Dalam tahap penentuan topik penelitian, terdapat dua aspek utama, yaitu kedekatan emosional dan kedekatan intelektual. Penelitian ini, penulis menggunakan kedekatan emosional dikarenakan penulis tertarik dengan pembahasan sejarah orang etnis Tionghoa dan merasa bangga sebagai etnis Tionghoa di Indonesia.

Setelah topik ditentukan, peneliti melanjutkan ke tahapan kedua, yaitu pengumpulan sumber atau heuristik. Pada tahap ini, peneliti mencari dan mengumpulkan data historis dari berbagai sumber, baik primer maupun sekunder. Sumber-sumber tersebut bisa berupa dokumen, arsip, artefak,



maupun catatan sejarah lainnya. Penulis menggunakan sumber primer dari arsip-arsip masa VOC dari periode tahun 1619 sampai 1742. Mencari pengalaman dan pengertian mengenai arsip masa VOC, penulis kemudian berkunjung ke ANRI dan tentunya situs Nationaal Archief.

Penelusuran ke ANRI, penulis membaca arsip dari Catatan Harian Kastel Batavia, yakni “*Stukken betreffende de Chinezenopstand van oktober 1740*”. Sedangkan di situs *Nationaal Archief*, penulis mampu menemukan membaca sumber dari arsip “*Register met getuigenissen en verhoren betreffende de opstand van de Chinezen in Batavia*” dan “*Kopie-secrete resoluties betreffende de opstand van de Chinezen 1740*” Ketiga dokumen arsip tersebut agak sukar untuk dibaca karena perbedaan penulisan yang ada di masa kini dengan abad ke-18. Akan tetapi, tidak semua arsip yang tersedia hanya berupa tulisan atau kertas yang masih asli, terdapat usaha dari *Landsarchief* untuk mempublikasi arsip yang sudah diketik pada akhir abad ke-19.

Pelaksanaan pengetikan dan publikasi plakat yang sudah menjadi buku diawasi oleh *landsarchivaris* (arsiparis negara), J.A. van der Chijs, antara tahun 1885-1900. Jilid pertama diterbitkan tahun 1885 oleh *Bataviaasch Genootschap van Kunsten en Wetenschappen* (Ikatan Kesenian dan Ilmu Pengetahuan Batavia). Hasil dari publikasi arsip adalah *plakaatboeken*, *resolutieboeken*, dan *dagh-registers van 't Casteel Batavia*. Penulis menggunakan arsip *plakaatboeken* dan *resolutieboeken* untuk menjadi sumber bagi penelitian ini. *Plakaat* dan *resolutiën* memuat kebijakan dan keputusan yang diambil oleh Gubernur Jenderal selama menjabat di Batavia.

Selain arsip primer dari VOC, penulis juga menggunakan sumber sejarah yang diambil dari catatan perjalanan seseorang yang pernah mengunjungi daerah Asia Tenggara, khususnya wilayah Batavia dari semenjak Sunda Kelapa, Jayakarta, hingga berubah nama menjadi Batavia. Contoh dari tulisan catatan perjalanan yang penulis gunakan adalah “*Suma*

*Oriental*” dari Tomé Pires. Sumber lain dari sudut pandang Tionghoa juga penulis dapatkan dan gunakan sebagai pembandingan dalam melakukan penelitian seperti tulisan dari Cheng Xunwo yang menjelaskan kondisi Batavia pada tahun 1730-an.

Selain dari sumber sejarah primer tersebut, penulis menggunakan berbagai sumber sekunder seperti buku dan jurnal untuk penulisan. Buku yang digunakan mencakup sejarah Belanda abad ke-15 hingga ke-18, sejarah VOC, sejarah perdagangan maritim pada abad ke-16 dan abad ke-18, perdagangan yang dilakukan VOC di Asia, sejarah Indonesia, sejarah lokal Jakarta, dan sejarah etnis Tionghoa di Nusantara. Fokus penelitian ini adalah etnis Tionghoa yang berada di Kota Batavia, maka penulis mengumpulkan dan membaca buku yang berkaitan dengan kehidupan sosial di Batavia, terutama mengenai orang Tionghoa.

Secara mendalam penulis menggunakan buku sebagai sumber terkait hubungan orang Tionghoa dengan VOC di Batavia dan kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Gubernur Jenderal VOC kepada mereka. Mempelajari kebijakan juga memerlukan biografi dari setiap Gubernur Jenderal yang pernah menjabat, maka penulis membaca buku biografi mereka. Penulis juga menggunakan sumber buku untuk mengetahui konflik antara orang Tionghoa dan VOC di Batavia, termasuk Pembunuhan Tionghoa tahun 1740, dengan menggunakan berbagai buku yang relevan. Selain dari buku, peneliti juga menggunakan artikel jurnal yang memuat informasi berkaitan dengan penelitian dan *permissiebriefjes*.

Tahap ketiga adalah verifikasi. Sumber-sumber yang sudah dikumpulkan akan diverifikasi, lalu dikritik oleh peneliti secara internal maupun eksternal dengan tujuan memastikan keaslian serta keakuratan sumber-sumber penelitian. Penelusuran kebenaran dan keabsahan sumber dilakukan dengan menelusuri kredibilitas dari isi sumber primer berupa dan sumber sekunder berupa jurnal yang relevan dengan batasan temporal penelitian. Lalu menelusuri keaslian dari sumber yang telah dikumpulkan.

Sumber-sumber sudah diverifikasi kemudian masuk ke tahap keempat, yaitu interpretasi. Interpretasi adalah langkah metode sejarah yang harus didukung oleh heuristik sebagai petunjuk ke arah penelitian (Kuntowijoyo, 2004). Interpretasi dilakukan untuk menafsirkan berbagai sumber yang telah diverifikasi keakuratannya dan disatukan dalam suatu tulisan. Kemudian, tulisan yang sudah berbentuk deskriptif dijadikan isi pembahasan penelitian yang selanjutnya masuk ke dalam tahap terakhir, yaitu Penyusunan Penulisan/Historiografi.

Tahap terakhir, yaitu historiografi, dalam tahap ini sumber-sumber yang sudah melewati beberapa tahapan sebelumnya akan ditulis secara ilmiah yang akan menjadi sebuah karya tulis ilmiah yang dapat dipertanggungjawabkan dan diuji.

## **2. Bahan Sumber**

Penelitian ini menggunakan dua jenis sumber sejarah, sumber primer dan sumber sekunder. Ada beberapa sumber primer VOC yang peneliti gunakan dalam penelitian ini, yaitu arsip yang tidak dipublikasikan dan arsip yang sudah dipublikasikan. Sumber ini memberikan peneliti akses terhadap informasi penting mengenai kebijakan yang diabadikan dalam *Plakaatboek* serta keputusan-keputusan yang terdokumentasi di *Generale Resolutiën van het Kasteel Batavia*. Di sisi lain, *Generale Missiven* menjadi referensi utama terkait laporan administrasi dan pembukuan VOC, serta memberikan gambaran tentang kondisi Batavia yang dilaporkan kepada *Heeren XVII* di Belanda. Sumber primer ini diperoleh dari *Nationaal Archief* yang berada di Den Haag, Belanda dan Arsip Nasional Republik Indonesia di Jakarta.

Penelitian mengenai sejarah Batavia, tidak hanya mengandalkan sumber dari VOC saja, terdapat satu sumber sejarah yang unik, karena memberikan sudut pandang lain, yakni dari orang Tionghoa. Penulis mengikutsertakan sebuah sumber sejarah bernama “*Kai Ba Lidai Shiji*” atau diterjemahkan ke bahasa Indonesia menjadi “*Sejarah Kalapa*”. Sumber



sejarah ini adalah *annals* atau dalam bahasa Indonesia menjadi Tawarikh, yang berisi tentang sejarah Kota Batavia, ditulis oleh penulis anonim dari etnis Tionghoa ketika paruh kedua abad ke-18 di Batavia.

Tetapi, terdapat kelemahan dari sumber ini, isi sumber yang hanya naratif dan banyak menimbulkan pertanyaan terkait faktualitas dan penulis yang anonim. Sangat disayangkan mengenai akurasi dari penulisan "*Kai Ba Lidai Shiji*", tetapi hal ini cukup di maklumi, bahwa pengarang sangat mengandalkan ingatan kolektif orang Tionghoa di Batavia dan subjektifitas kepada Tionghoa dibandingkan orang-orang Eropa. Leonard Blussé pada tahun 2018, berhasil menerbitkan buku berjudul "*The Chinese Annals of Batavia, the Kai Ba Lidai Shiji and Other Stories (1610-1795)*". Buku ini menjadi pedoman penulis dalam membaca "*Kai Ba Lidai Shiji*".

Untuk melengkapi sumber primer, penulis juga menggunakan berbagai sumber sekunder yang terdiri dari buku dan jurnal ilmiah terkait. Buku-buku yang digunakan berfokus pada topik sejarah Belanda, salah satunya adalah "*The Dutch Republic: Its Rise, Greatness, and Fall 1477-1806*" yang ditulis oleh Jonathan Israel pada tahun 1998. Selain itu, untuk memperdalam pembahasan mengenai sejarah VOC, penulis merujuk pada karya C. R. Boxer (1983) "*Jan Kompeni: Dalam Perang dan Damai 1602-1799*". Lebih jauh, penulis juga menggunakan karya Jason Sharman (2020) yang berjudul "*Empires of the Weak: The Real Story of European Expansion and the Creation of the New World Order*".

Perdagangan yang dilakukan oleh VOC di wilayah Asia Tenggara telah direkonstruksi secara mendalam oleh Kristof Glamann (1958) dalam karyanya yang berjudul "*Dutch-Asiatic Trade, 1620-1740*". Selain itu, penulis juga merujuk pada karya Robert Parthesius (2010) berjudul "*Dutch Ships in Tropical Waters: The Development of the Dutch East India Company (VOC) Shipping Network in Asia 1595-1660*". Memasuki wilayah Asia dan Nusantara di mana penulis merujuk pada beberapa sumber utama. Salah satu buku yang menjadi acuan awal adalah "*Sejarah*

*Indonesia Modern: 1200-2004*" karya M.C. Ricklefs yang terbit pada tahun 2005.

Setelah memahami sejarah Indonesia secara luas, fokus penelitian beralih pada sejarah lokal, khususnya Kota Jakarta. Penulis menggunakan sumber dari buku "*Sejarah Kota Jakarta: Tapak Jejak Batavia*" oleh Thomas B. Ataladjar (2018) dan "*Sejarah Jakarta dari Masa Prasejarah hingga Akhir Abad ke-20*" oleh Adolf Heuken (2018). Selain itu, penulis juga merujuk pada buku karya penulis asing, seperti "*Jakarta: Sejarah 400 Tahun*" oleh Susan Blackburn (2011) dan "*Jakarta: History of a Misunderstood City*" oleh Herald Van der Linde (2022).

Tulisan dari Tomé Pires, yang berjudul "*Suma Oriental que trata do Mar Roxo até aos Chins*" yang diambil dari buku terjemahan dari MS Portugis di *Bibliothèque de la Chambre des Deputes Paris* dan diedit oleh Armando Cortesao (1944) yang berjudul "*The Suma oriental of Tomé Pires: an account of the East, from the Red Sea to Japan and, the book of Francisco Rodrigues*" menjadi sumber yang baik untuk mengetahui keadaan di Sunda Kelapa.

Untuk menggali lebih dalam mengenai kehidupan sosial Batavia pada masa VOC, penulis merujuk pada beberapa buku karya Jean Gelman Taylor (2009) "*Kehidupan Sosial di Batavia: Orang Eropa dan Eurasia di Hindia Timur*", lalu karya Tawalinuddin Haris (2007) "*Kota dan Masyarakat Jakarta: Dari Kota Tradisional ke Kota Kolonial Abad XVI-XVIII*", dan Remco Raben (1996) "*Batavia and Colombo. The Ethnic and Spatial Order of Two Colonial Cities 1600-1800*". Memberikan informasi tentang kehidupan sosial-budaya, termasuk populasi penduduk Batavia yang menjadi salah satu faktor dalam penelitian ini.

Subjek dalam penelitian ini adalah orang etnis Tionghoa. yang memiliki keterkaitan erat dengan sejarah sosial dan ekonomi Batavia. Untuk memahami lebih lanjut, penulis membaca buku "*Anti Cina, Kapitalisme Cina, dan Gerakan Cina: Sejarah Etnis Cina di Indonesia*"

terbitan tahun 2008, serta "*Riwayat Tionghoa Peranakan di Jawa*" terbitan tahun 2005, oleh Onghokham. Melengkapi tulisan dari Onghokham penulis mencari bagaimana keterikatan orang Tionghoa yang ada di daerah perantauan dengan pemerintahan Tiongkok menggunakan buku "*Boundaries and Beyond: China's Maritime Southeast in Late Imperial Times*" karya Ng Chin-Keong yang terbit pada tahun 2017.

Secara terkhusus, penelitian mengerucut kepada orang Tionghoa di Kota Batavia, maka penulis membaca buku "*Persekutuan aneh: pemukim Cina, wanita peranakan, dan Belanda di Batavia*" oleh Leonard Blussé (2004) dan "*Sejarah para pembesar mengatur Batavia*" oleh Mona Lohanda (2007). Orang Tionghoa di Batavia yang membentuk komunitas dan menjadi penduduk kota juga terkenal akan keberadaan sistem opsir, Penulis mendapatkan informasi mengenai sistem opsir dari buku "*The kapitan Cina of Batavia, 1837-1942: a history of Chinese establishment in colonial society*" karya Mona Lohanda yang terbit pada tahun 1996.

Merekonstruksi hubungan orang Tionghoa dengan VOC di Batavia juga sudah pasti mencari tahu tentang VOC itu sendiri, di mana VOC merupakan perusahaan, memiliki struktur kepemimpinan, berupa *Heeren XVII* beserta jabatan Gubernur Jenderal, Dewan Hindia, dan lain-lain. Penulis membaca buku "*Nieuw Nederlandsch biografisch woordenboek*" oleh P.C. Molhuysen dan P.J. Blok (1924) untuk mengetahui biografi setiap Gubernur Jenderal yang menjabat pada masa itu.

Pada tahun 2023, Bondan Kanumoyoso, dosen di Universitas Indonesia, menerbitkan sebuah buku berjudul "*Ommelanden: Perkembangan Masyarakat dan Ekonomi di Luar Tembok Kota Batavia*". Buku ini memberikan kontribusi signifikan bagi penulis dalam memahami dinamika kehidupan sosial dan ekonomi yang berkembang di wilayah *Ommelanden* atau luar tembok Kota Batavia sejak tahun 1680-an ketika awal pembukaan wilayah tersebut. Melalui buku ini, penulis melihat hubungan erat antara kawasan *Ommelanden* dengan Batavia secara lebih



mendalam, menyoroti bagaimana kehidupan di wilayah pedalaman ini sangat berpengaruh terhadap perkembangan Batavia dan orang-orang Tionghoa sebagai salah satu penduduk *Ommelanden* yang mendapat keuntungan dan juga kerugian pada periode yang berbeda.

Kerugian yang dialami ini pada nantinya akan menimbulkan permasalahan yang serius pada kedua belah pihak, antara orang Tionghoa dengan VOC sebagai penguasa. Permasalahan antara orang Tionghoa dan VOC di Kota Batavia akhirnya memuncak dengan peristiwa 1740, peristiwa ini telah ditulis oleh B. Hoetink (1918) dalam disertasi yang berjudul "*Ni Hoekong Kapitein Der Chineezen Te Batavia In 1740*".

Penelitian Hoetink juga menyangkut sistem opsir Tionghoa, salah satu tulisan miliknya yaitu berjudul "*Chineesche Officieren Te Batavia Onder de Compagnie*" yang terbit pada tahun 1922. Selain itu, peneliti juga menggunakan buku "*Tionghoa di Batavia dan huru hara 1740*" oleh Johannes Theodorus Vermeulen yang terbit pada tahun 2010. Peneliti juga menggunakan artikel yang berjudul "*The Massacre of 1740 as Reflected in a Contemporary Chinese Narrative*" oleh Claudie Salmon (2009). Sebuah catatan dari Cheng Xunwo, yang pernah pergi ke Batavia pada tahun 1730-an dan melihat kehidupan sosial Tionghoa di Batavia sebelum peristiwa 1740.

Terdapat juga beberapa peta lukisan, dan ilustrasi yang dapat digunakan sebagai referensi oleh peneliti untuk menganalisis perkembangan historis Kota Batavia. Penelitian ini tidak hanya mengandalkan data arsip berupa dokumen dan peta sebagai sumber informasi utama, tetapi juga dilengkapi dengan kajian lapangan di kawasan Kota Tua Jakarta, yang merupakan situs cagar budaya yang masih tersisa sebagai bukti keberadaan infrastruktur VOC di masa lalu.